

## **Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Republik Islam Iran**

**Dio TanBrani<sup>1\*</sup>, Wakidi<sup>2</sup> dan Syaiful M<sup>3</sup>**

FKIP Unila Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 704 947 faximile (0721) 704 624

*e-mail* : diyokecil@yahoo.co.id

Hp. 082183824581

*Received:20 April 2017, Accepted:20 April 2017, Online Published:28 April 2017*

*The purpose of this study was to determine the foriegn policy of the United States againts the Islamic Republic of Iran`s nuclear program from 2003 to 2008. This study used historical Methology with documentation and literature data collection techniques literature. Data analysis techniques used Qualitative descriptive. Based on the results, that development policy was an attempt USA Political confrontation with the Islamic Republic of Iran, with sanctios, embargos, including brought to the United National Security Council and the threat of a military strike against nuclear facilities of the Islamic Republik of Iran.*

**Keywords** : *policy, conflict, nuclear politics.*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir Republik Islam Iran 2003-2008. Penelitian ini menggunakan metode Historis dengan tehknik pengumpulan data dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Bahwa Kebijakan Politik Amerika Serikat merupakan upaya konfrontasi dengan Republik Islam Iran, dengan menerapkan sanksi, embargo, termasuk dibawa ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ancaman serangan militer terhadap fasilitas nuklir Republik Islam Iran.

**Kata kunci:** kebijakan, konflik, nuklir, politik.

## PENDAHULUAN

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amerika Serikat khususnya, telah sangat dipengaruhi oleh, universitas Jerman sebagai model, interpretasi-interpretasi ekonomi masyarakat, entah itu Madisionian atau Marxis dan gerakan progresif. Model universitas Jerman secara filosofis berakar pada berbagai manifestasi dari Hagelianisme yang dimasukkan ke dalam *Kulturprotestanisme* (Charles Glock, 1972 :11).

Pada masa-masa awal, demikian versi Hegelianisme ini, Roh ilahiah diketahui melalui Kitab Injil dan gereja-gereja. Namun, dalam perkembangan sejarah manusia roh tersebut diwujudkan kedalam intuisi manusia, kecuali mereka yang utamanya bersandar pada akal-budi dan ilmu pengetahuan. Negara, universitas, pengelola pemerintahan, teolog, ilmuwan, semuanya membaca dan mengejawantahkan rencana ilahiah tersebut (Charles Glock, 1972 :15).

Banyak universitas Amerika Serikat swasta maupun negeri berawal sebagai institusi-institusi sektarian dengan penekanan pada tempat beribadah dan kekuatan moral. Sebagian besar pemimpin dan guru besar mereka adalah "pendeta".

Tocqueville menyatakan "bahwa agama di Amerika Serikat menopang kebiasaan-kebiasaan baku rakyatnya. Agama bagi Tocqueville merupakan faktor utama untuk mencegah kesetaraan menjadi depotisme. Agama juga merupakan penyeragam dan pemersatu, dimana hukum bersumber dari kedaulatan rakyat, tetapi keadilan bersumber dari kedaulatan umat manusia dan Sang Pencipta. Hukum keadilan yang semakin tinggi merupakan suatu pelindung dari tirani mayoritas

(Alexis de Tocqueville, [1835, 1840], 1958 : 70-269)..

Gagasan-gagasan tentang kemajuan manusia melalui kesempurnaan umat manusia, penampakan progresif Roh ilahiah melalui institusi-institusi manusia hingga titik dimana yang ilahi tidak dapat dibedakan dari yang duniawi, penerapan ilmiah pada semua masalah manusia, perolehan hak milik pribadi melalui kepentingan ekonomi yang bebas, dan pendirian-pendirian libertarian menyangkut perilaku moral yang tidak memungkinkan adanya klaim untuk tunduk pada standar-standar komunitas. Sebagian gagasan ini telah merangsang baik gerakan-gerakan konservatif maupun liberal dalam dekade-dekade belakangan ini. Sering kali mereka di sinkretisasi oleh etos moralis dari wacana politik Amerika Serikat sehingga apa yang secara esensial anti-agama pada awalnya dikuduskan sebagai alasan agama untuk tujuan sekuler (David C. Leeger, Lyman A. Kellstedt, 1993:17).

Budaya politik Amerika Serikat tentang *dosa asal* tertanam dalam pemerintahan terbatas, pemisahan kekuasaan terbatas, dan ketidakpercayaan pada politisi-politisi. *Teologi perjanjian* membenarkan tatanan konstitusional untuk memberontak. Rasa sebagai *bangsa yang terpilih* terbukti dalam tujuan nasional, takdir yang nyata, imprealisme ekonomi, dan ekspor demokrasi. Semua itu merupakan gagasan keagamaan yang mempunyai konsekuensi politik (Wald, 1992:45-68).

Wacana politik Amerika Serikat terhadap Iran merupakan agenda dari tujuan-tujuan tersebut, khususnya setelah perang dunia

kedua ketika Amerika Serikat menemukan kembali mental imperialisme nya.

Pengetahuan Amerika Serikat mengenai Iran sepenuhnya merupakan kesadaran mengenai potensinya sebagai sekutu, nilai integritas Iran dalam sistem internasional serta peran konstruktif dalam urusan regional. Sayangnya Iran merupakan isupolitik yang terlalu sulit dihadapi sehingga keterlibatan membawa dampak yang tidak bisa ditebak dan konsekuensi politik domestik yang ditimbulkannya terlalu besar.

Momen Revolusi Islam di Iran pada 1979 akan mengikat Amerika Serikat dan Iran dalam sebuah hubungan bersama yang traumatis. Meski ada upaya untuk menormalisasikan hubungan, namun upaya ini terbukti gagal dikarenakan hanya bersifat satu arah. Pasca revolusi 1979 fleksibilitas politik di Iran menguat namun salah arah, sedangkan kebijakan Amerika Serikat kaku, sehingga kompromi tidak dimungkinkan.

Setelah Perang Dingin berakhir transformasi hubungan ini diperburuk oleh kebijakan pengabaian yang dilakukan Amerika Serikat, dimana Iran dibebaskan untuk memilih metode interaksinya sendiri. Oleh sebab itu Amerika Serikat tidak memahami Iran, dikarenakan mereka bermain dalam permainan yang didefinisikan oleh lawan mereka.

Defisit pengetahuan akan konteks historis Iran serta hubungannya dengan Barat, ketiadaan personel di lapangan, dan implikasi kembalinya semangat revolusioner Amerika Serikat memastikan bahwa kedua belah pihak mempertahankan mitologi

revolusi masing-masing. Hal ini memastikan bahwa kedua negara berada dalam posisi konfrontasi.

Setelah peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat merubah sikap dari tidak peduli menjadi sangat perlu berbuat sesuatu. Iran bukan lagi masalah, melainkan sumber masalah. Dimulai dengan kekacauan legal yang mengawali invasi di Irak serta upaya ceroboh dengan melakukan negosiasi nuklir akan memperburuk isu regional. Menariknya justru Iran yang memetik manfaat akibat kebijakan picik pemerintahan Bush.

Penghancuran efektif terhadap dua musuh terbesar Iran di kawasan menghasilkan kekosongan geopolitik, dan menjadikan Iran sebuah kekuatan regional. Kekhawatiran meningkat ketika menyadari bahwa Iran merupakan kekuatan imperial yang kini didorong oleh semangat religius.

Tuduhan pada ambisi nuklir Iran merupakan upaya konfrontasi Amerika Serikat, dimana ketiadaan bukti dianggap sebagai bukti kesalahan. Anehnya, krisis nuklir ini bukan merupakan masalah legalitas tetapi lebih kepada masalah perilaku. Secara antusias Amerika Serikat mendelegasikan masalah nuklir kepada Eropa dengan mengindikasikan bahwa mereka tidak akan senang kecuali Iran menghentikan program nuklir nya. Di sisi lain naiknya kelompok garis keras di Iran mengisyaratkan bahwa tidak akan ada kesepakatan apa pun dengan Eropa, dan bersikeras untuk melanjutkan pengayaan uraniumnya.

Krisis negosiasi nuklir tahun 2003-2008 tidak dapat dipahami tanpa mengetahui terlebih dahulu transformasi hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang akan

membentuk, menandai, serta menentukannya. Jika kedua negara terus terpatri pada negosiasi nuklir, sehingga mengalihkan isu yang sebenarnya, sama saja mereka berlutut pada konflik.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Sartono Kartodirjo melihat permasalahan atau pemilihan metode merupakan : “permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah dapat disebut masalah pendekatan. Penggambaran kita mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan, ialah dari segi mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diperhatikan. Hasil penukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis pendekatan yang dipakai ( Sartono Kartodirjo, 1993:24).

Menurut Sartono Kartodirjo sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, ialah bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian dan kesatuan itu merupakan suatu unit yang mencakup fakta-fakta terangkakan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah baik proses maupun struktur (Sartono Kartodirjo, 1993:14).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian historis dalam tulisan ini adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau berupa data dan fakta atau dokumen yang disusun secara struktural, dari evaluasi yang objektif dari masa kini dan situasi yang akan mengekstrapolasikan fakta-fakta yang berperan pada masa lalu dengan demikian dapat memproyeksi masa depan.

Menurut pendapat Mohammad Nazir, Variabel dalam arti sederhana adalah suatu konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Mohammad Nazir, 1988:149). Menurut pendapat Sumandi Suryabrata bahwa variable sebagai segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, sedangkan variable penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti (Sumardi Suryabrata, 2000: 72).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik Studi pustaka dan dokumentasi. Menurut pendapat Joko Subagyo yang dimaksud dengan tehnik kepustakaan adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah (Joko Subagyo, 2006: 109).

Tekhnik dokumentasi menurut Sumardi Suryabrata yaitu, secara besar sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Teori-teori dan konsep-konsep pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan umum yaitu kepustakaan yang berwujud buku-buku teks, ensiklopedia, monograph dan sejenisnya’ (Sumardi Suryabrata, 1983 : 18).

Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip H.B. Sutopo, tentang tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data yaitu sebuah proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan di

lapangan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu serta mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam penganalisis atau mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
3. Verifikasi data yaitu menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaannya dan kebenarannya (H.B. Sutopo, 2006: 113).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Budaya Politik Amerika Serikat  
Ilmu sosial dan ilmu politik Amerika Serikat khususnya, telah sangat dipengaruhi oleh, Universitas Jerman sebagai model, interpretasi-interpretasi ekonomi masyarakat, entah itu Madisionian atau Marxis dan gerakan progresif. Model Universitas Jerman secara filosofis berakar pada berbagai manifestasi dari Hagelianisme yang dimasukkan ke dalam *Kulturprotestanisme* (Charles Glock, 1972 :11). Pada masa-masa awal, versi Hegelianisme ini, Roh ilahiah

diketahui melalui Kitab Injil dan gereja-gereja. Namun, dalam perkembangan sejarah manusia roh tersebut diwujudkan kedalam intuisi manusia, kecuali mereka yang utamanya bersandar pada akal-budi dan ilmu pengetahuan. Negara, universitas, pengelola pemerintahan, teolog, ilmuan, semuanya membaca dan mengejawantahkan rencana ilahiah tersebut (Charles Glock, 1972 :15).

Bagaimanapun, organisasi keagamaan sangat terlibat dalam sosialisasi awal pada masyarakat Amerika yang terus berjalan hingga kini. Keyakinan Protestan *garis-utama* sangat tertanam dalam “budaya yang mendalam” dari ilmu sosial pada zaman itu (David C. Legee, 1993 : 12).

Dalam budaya politik Amerika Serikat misalnya, gagasan tentang *dosa asal* atau kebobrokan manusia tertanam dalam pemerintahan terbatas, pemisahan kekuasaan, dan ketidakpercayaan kepada politisi-politisi. *Teologi perjanjian* membenarkan tatanan konstitusional dan hak untuk memberontak. Rasa sebagai *bangsa yang terpilih* terbukti dalam tujuan nasional, takdir yang nyata, imperialisme ekonomi, dan ekspor demokrasi. Semua itu merupakan gagasan keagamaan yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi politik (Wald D. Kenneth, 1992 : Congressional Quarterly Press).

Elite-elite politik AS kontemporer mengembangkan tema kampanye dan menggunakan citra keagamaan untuk membangun koalisi yang, sebagian, didasarkan pada seruan-seruan keagamaan. Sering kali mereka di sinkretisasi oleh etos moralis dari wacana politik

Amerika Serikat sehingga apa yang secara esensial anti-agama pada awalnya dikuduskan sebagai alasan agama untuk tujuan sekuler (David C. Leeger, Lyman A. Kellstedt, 1993:17).

Dengan demikian budaya politik Amerika Serikat memiliki suatu hukum yang lebih tinggi yang memberikan tujuan bagi negara. Negara mendapatkan legitimasinya berkat hukum yang lebih tinggi tersebut. Imprealisme ekonomi, perang agar dunia aman bagi demokrasi, menyebarkan kebebasan keseluruh dunia. Sulit untuk memisahkan yang religius dan politik dalam budaya politik Amerika Serikat.

## 2. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat di Asia Barat.

Globalisasi telah mendorong terjadinya banyak perubahan besar, terutama dalam kaitannya dengan kekuasaan politik dan otonomi negara. Saat ini, telah terjadi perubahan-perubahan ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesalinghubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menantang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik, negara modern (David Held, 2000, *Regulation Globalization, international sociology*, 394).

Setelah Perang Dunia II berakhir banyak perubahan yang terjadi dari setiap bangsa/negara, terutama dalam hal kekuasaan politik serta penyebaran pengaruh terhadap suatu kawasan. Asia Barat merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak, kawasan ini juga dikenal dengan kawasan yang paling bermasalah di dunia.

Konflik sektetarian, upaya perdamaian, serta keinginan Amerika Serikat untuk mendominasi dunia mulai terlihat.

## 3. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Iran 1953- 1978

Sejak 1952, bantuan dan pinjaman AS kepada Iran telah mencapai sekitar \$1.135 juta.... sekitar \$631 juta digunakan untuk bantuan ekonomi dan \$504 juta untuk bantuan militer. Semua bantuan militer dan lebih dari setengah bantuan ekonomi berupa hibah.”(FO 317 157604 EP 1015/102 Internal Political Situation, 18 Mei 1961).

Pemerintahan Demokrat di bawah Kennedy, memutuskan untuk mengambil kebijakan proaktif di Iran. Hubungan ini dibarengi dengan pertumbuhan dramatis akan kesadaran politik di Iran. Sehingga identifikasi negatif terhadap AS mengiringi Iran modern.

“Pada 1953, CIA, dan rekannya di Britania SIS(yang juga dikenal sebagai M16), menggulingkan Mosaddeq. Berbagai dokumen baru-baru ini meski tidak lengkap yang terungkap berkat *Freedom of Information Act* (UU Kebebasan Informasi) di AS menunjukkan betapa menyeluruhnya rencana itu. (Kermit Roosevelt, 1979 : 199-200).

Selanjutnya, AS meyakinkan Syah bahwa struktur sosial negara itu membutuhkan perubahan fundamental jika ingin dinastinya bertahan dan tidak tenggelam dalam komunisme. Perubahan yang dibutuhkan itu adalah reformasi agraria. Tetapi reformasi agraria bukan sekedar `reformasi`. Itu adalah sebuah revolusi yang ditunjukkan untuk merusak kekuatan politik dan juga ekonomi kelas paling

berpengaruh di negara itu (Y. Alexander dan A. Nanes, 1964 : 348-350).

Mengomentari momentum proses modernisasi ini, pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan: “Semakin lama dia (Syah) menunggu, semakin besar dorongan revolusi yang harus dia bendung, enam tahun dalam dunia modern mungkin kelihatannya lama; tapi kita harus ingat bahwa, pada 1978 nanti, kita akan hampir menyelesaikan pengiriman 800 kapten tentara, plus apa pun senjata canggih yang Syah pesan (mungkin termasuk pabrik senjata dan amunisi). Semua peralatan ini bisa berada di tangan pemerintahan revolusioner”(Wright to Melhuis, 21 Juni 1972).

“Ini bukan berarti bahwa kondisi di Iran akan mengambang sebuah situasi revolusi dalam enam tahun ke depan, mungkin ada cukup pengawasan berimbang bagi terciptanya perubahan tertata di bawah Monarki, jika Syah menghadapi masalah peningkatan iteligenia dengan pikiran terbuka dan ekspresi sosial: dia menyadari hal ini, meski dengan segan, namun dia tidak tahu bagaimana memulainya. Putranya mungkin terlalu kecil untuk menahan tekanan dari bawah, terutama jika perubahan monarki terjadi melalui kekerasan berupa pembunuhan dengan segala kekuatan emosionalnya. Yang ingin saya katakan saat ini hanyalah bahwa bahaya bagi Monarki dalam 5-6 tahun lagi mungkin lebih besar daripada bahaya jangka pendek”(Wright to Melhuis, 8 Juni 1972).

4. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pasca Revolusi Islam 1979.

Revolusi Islam di Iran adalah sebuah kenyataan yang sulit diterima AS. Kaum Republik menganggap ini sebagai kegagalan kaum Demokrat, terutama akibat liberalisme tidak jelas ala Carter. Kaum Demokrat menyalahkan dukungan buta pemerintahan Nixon kepada Syah. Kelompok-kelompok di AS yang saling menyalahkan kemudian beralih menyalahkan lawan yang di rasa paling tepat, yaitu rakyat Iran, yang dianggap telah kehilangan sudut pandang rasional (Ali M. Ansari, 2006 : 101-102).

Kedatangan Syah ke AS, dinamika perimbangan situasi pun berubah. Sebagian aktivis, yang dipicu oleh kekhawatiran tulus dan optimisme politik, memutuskan untuk melancarkan pukulan terhadap AS, yang semakin digambarkan sebagai Setan Besar. Dengan melakukan penyerbuan terhadap Kedubes Amerika Serikat beserta 52 diplomat yang berlangsung selama 444 hari (Ali M. Ansari, 2006 : 107-108).

Berakhirnya Perang Dingin Amerika Serikat mengumunkan sebuah Tatanan Dunia Baru. Merupakan masa yang tepat untuk mengevaluasi dan memikirkan kembali berbagai tantangan internasional yang dihadapi AS. “Saat AS membahas pengaturan keamanan pascaperang Teluk. Iran merasa mereka seharusnya menjadi bagian dari aprarat keamanan, namun anehnya mereka ternyata disingkirkan dari segala pembahasan (Iran Times, 1991 : 1-12).

Terpilihnya Bill Clinton akan mengubah landskap politik di Timur Tengah, kepentingan internasional AS pasca Perang Dingin akan

mengubah aturan main, yang didominasi oleh prioritas Israel. Menyangkut Iran, Bill Clinton mengeluarkan kebijakan pengabaian, dan perintah eksekutif yang membatasi segala hubungan ekonomi (Ali M. Ansari, 2006 :159-161).

Ketika ketidakpedulian AS terhadap Iran semakin meningkat, Presiden Khatami memutuskan isu ini lebih baik ditangani dengan menempatkannya dalam suatu bingkai rekonsiliasi, yang menekankan komunikasi budaya bermakna. (A. Nuri, 1998 117-121).

Proposal Khatami ditanggapi secara resmi oleh Albright pada tahun 2000, signifikasinya terletak pada fakta bahwa AS berdialog dengan rakyat Iran. Alih-alih berbicara soal “apa yang kami inginkan”, Amerika berbicara soal “apa yang bisa kami lakukan untuk Anda” (Ali M. Ansari, 2006 : 202).

Kaum konservatif di AS dan Iran menentang kedekatan seperti ini, Kelompok-kelompok ini mempunyai kesamaan ideologis yang terkonsolidasi selama bertahun-tahun, yang akan mencegah kedekatan AS dan Iran.

Kejadian 11 September 2001 mengguncang AS, didukung penuh oleh komunitas internasional dan PBB, mereka berniat membalas Taliban di Afghanistan. Tendensinya jelas, melakukan konfrontasi dengan siapapun. Iran mau membantu pasukan koalisi untuk dapat masuk, dan yang lebih penting dapat keluar dari Afghanistan dengan aman.

Gaya diplomasi Perwakilan Bush untuk konferensi Bonn, James Dobbins, mengatakan bahwa : “orang-orang Iran sangatlah profesional, tegas, dapat diandalkan,

dan sangat membantu, mereka juga kritis terhadap keberhasilan kita. Mereka mengajak Aliansi Utara (musuh-musuh Afghan Taliban) untuk membuat kesepakatan-kesepakatan akhir yang kita minta”. Dobbins membawa proposal tersebut ke sebuah pertemuan penting di Washington hanya untuk menghadapi kebisuan. Menteri Pertahanan saat itu Donald Rumsfeld, ucapnya “Menatap kebawah dan menggemerisikan kertas-kertasnya.” Tidak ada jawaban yang diberikan kepada Iran. Kenapa harus dipikirkan? Mereka gila (Newsweek, 3 April 2006).

5. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Nuklir Republik Islam Iran.

Program Nuklir Republik Islam Iran pada 1974, Amerika Serikat menandatangani kesepakatan sepuluh tahun untuk memasok Iran dengan uranium yang telah diperkaya. Iran mengumumkan untuk memesan lima pembangkit listrik tenaga nuklir dari Prancis dan juga Kanada. Sementara Britania berkonsentrasi pada penyediaan pelatihan kepada ilmuwan nuklir Iran. Secara keseluruhan, Iran ingin “memasang sekitar 28.000 MW kapasitas nuklir (AB65/611 Iran: Introduction of Nuclear Power, correspondence, 1969-1985).

Henry Kissinger mengusulkan pendirian usaha kerja sama internasional untuk mengelola dan mengawasi pengayaan nuklir yang sekaligus mencegah Iran agar tidak menganggap usulan itu sebagai sesuatu yang praktis sama sekali. Dari diskusi-diskusi awal ini, jelaslah ada masalah dalam sistem non-proliferasi. Pendekatan ini tidak berubah hingga sekarang, meski

situasi militer telah berubah (Memoir Dr. Etemad, [www.Iranian.com](http://www.Iranian.com)).

6. Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Program Nuklir Iran 2003-2008.

Pada Februari 2003 IAIE melakukan inspeksi ke fasilitas nuklir Iran. Sebagai reaksi atas meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap program nuklir Iran. Kekhawatiran yang kurang berdasar ini semakin meningkat ketika rezim Ba'ath di Irak jatuh yang membuat kelompok garis keras Iran terkejut. Diikuti laporan IAIE yang mengecam Iran karena melanggar komitmennya di bawah peraturan NPT karena tidak sepenuhnya mengungkapkan kegiatannya (IRNA, 2 Juni 2003, BBC SWB Mon ME1 MEPol).

Eropa ingin meyakinkan Iran tentang keseriusan masalah tersebut. Strategi Eropa pada intinya legal; Iran melanggar komitmen NPT nyadan tekanan AS untuk melaporkannya ke PBB semakin besar. Uni Eropa akan menawarkan penyelesaian negosiasi, dimana Iran akan berjanji untuk terbuka mengenai semua aktifitas mereka dan menandatangani serta meratifikasi Protokol Tambahan (menambahkan elemen kewajiban dalam perjanjian sukarela), yang akan memungkinkan pemeriksaan lebih mendalam atas program nuklir Iran (Ali M. Ansari, 2006 : 229).

Situasi pada 2004 akan menjadi lebih rumit di beberapa sisi. Parlemen Iran yang baru tak berniat meratifikasi Protokol Tambahan. Tak ada negosiasi terperinci apa pun yang bisa membuat kedua pihak melepaskan realitas vital tersebut, dan mungkin proses negosiasinya sendiri telah

memperburuk keadaan. Kelompok garis keras di kedua negaraselalu menggunakan tekanan politik yang sepenuhnya berbeda, yang mulai menunjukkan tidak akan ada kesepakatan apa pun dan konteks perdebatannya juga akan berubah (Connie Bruck, 2006 : 56).

Januari 2005, dalam sebuah wawancara televisi NBC, Presiden George W. Bush menanggapi perkembangan negosiasi nuklir Iran, menyatakan bahwa serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran adalah salah satu alternatif terutama jika Iran terus bersikeras untuk melanjutkan program nuklirnya. Dan menyebutkan bahwa krisis nuklir Iran dapat memicu serangan *preemptive*. (Reuters, 17 Januari 2005).

Pada 4 Februari 2006 Dewan Gubernur IAIE mengadopsi sebuah resolusi dalam rapat darurat PBB yang membahas laporan-laporan mengenai program nuklir Iran. Iran kemudian menghadapi hal ini dengan sikap yang keras, yaitu dengan menyatakan bahwa Iran tidak akan patuh dan tunduk pada penekanan-penekanan semacam itu. ([http://www.nti.org/e/e\\_research/profile/Iran.htm](http://www.nti.org/e/e_research/profile/Iran.htm)).

Juni 2006, 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB ingini menyetujui proposal baru yang akan ditawarkan kepada pemerintah Iran. Yang ditunjukkan untuk membujuk Iran agar menunda pengayaan uraniumnya, sekaligus kemungkinan pemberian sanksi apabila Iran menolak. Dimana salah satu isinya adalah kesediaan Amerika Serikat untuk berdialog dengan Iran (<http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN060609.htm>, 17 September 2008). Sejak diajukan ke DK PBB tahun 2006, dibahas pada 23

Desember 2006, hingga menghasilkan Resolusi 1737. Laporan Dirjen IAEA tanggal 22 Februari 2008 berbeda dengan laporan tahun 2006 dan 2007, basis lahirnya resolusi 1737 dan 1747 yang memberi sanksi kepada Iran. Resolusi 1747 meminta Iran transparan dan bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Internasional, dan menghentikan proses pengayaan uraniumnya ([www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8792.doc.htm](http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8792.doc.htm)).

### **PEMBAHASAN**

Konsekuensi Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Hubungannya dengan Republik Islam Iran.

Budaya politik AS yang memiliki semangat religius ternyata lebih dikenal oleh Iran pasca Revolusi 1979, yang ingin menyebarkan idenya tentang “Kebebasan” keseluruh dunia. Namun di dalam praktiknya kesamaan budaya, mental, yang dimasukkan ke dalam tujuan religius ini berlawanan arah sehingga kedua belah pihak berada dalam posisi konfrontasi.

Berbagai peristiwa 1953-1979 yang sebelumnya berjalan akan mengkontruksi hubungan AS-Iran yang awalnya bersahabat menjadi saling curiga. Revolusi 1979 akan mengkristalisasi tradisi ini, dan mengikat Iran dan AS dalam sebuah hubungan ideologis yang intim, yang ditentukan oleh pengalaman kolektif bersama yang traumatis.

Persinggungan ini sangat populer dan demokratik, kedua negara merupakan kekuatan imperial, dan tidak satupun di antara kedua belah pihak bersedia dipengaruhi oleh aturan masyarakat internasional. Sehingga dalam hal politiklah paralel antara AS dan Iran menjadi ekplisit.

Meski ada upaya untuk menormalisasi hubungan ini, namun upaya ini hanya berjalan satu arah. Kebijakan Iran pasca Revolusi memperlihatkan kelenturan namun salah arah. Di AS kebijakannya terlihat kaku seperti bangunan sehingga kompromi tidak dimungkinkan. AS gagal dalam melihat perubahan generalisasi dinamika politik Iran. Alasan pengabaian ini bersifat ideologis dan struktural.

Pengabaian ini juga bersifat mengkarantina, mendukung, dan menopang intelektulitas politik di Iran, Karena tidak adanya kebijakan yang konstruktif dari AS, Iran mulai menciptakan kebijakan yang konstruktif untuk dirinya sendiri. Wajar bila AS tidak pernah dapat mengeti Iran, dikarenakan mereka bermain diwilayah yang didefinisikan oleh lawan mereka.

Kepemimpinan George W. Bush, AS merubah sikap dari yang tidak peduli menjadi sangat perlu berbuat sesuatu, Iran bukan lagi masalah tetapi sumber masalah, Iran bukan hanya Poros Setan melainkan pendirinya, bankir bagi terorisme global, irasional dan fanatik. Dimulai dengan kekacauan legal yang mengawali invasi di Irak dan upaya ceroboh dengan melakukan konfrontasi terkait program nuklir Iran hanya akan mengalihkan isu yang sebenarnya.

Tidak adanya penjelasan yang jelas dari AS mengenai invasi di Irak dan diikuti sebagian pihak di AS yang membicarakan tentang perubahan rezim di Iran tanpa mendefinisikan apa yang mereka maksud. Hal ini membuat geram konsituensi Iran, dan memicu reaksi kelompok garis keras. Oleh karena itu Ahmadinejad dan para

pendukungnya memiliki kapasitas untuk mengatakan bahwa isu nuklir merupakan kamufase AS untuk menimpakan nasib Irak sekarang kepada Iran.

Konfrontasi Amerika Serikat mengenai Program Nuklir Republik Islam Iran 2003-2008.

Konfrontasi AS menyangkut program nuklir Iran merupakan konsekuensi dari masalah-masalah yang lebih luas antara AS dan Iran, bukan penyebabnya. Sebuah klaim gila dimana ketiadaan bukti Iran mengembangkan senjata nuklir dianggap oleh AS sebagai bukti kesalahan. AS juga memiliki standar tinggi untuk memaksa penolakan dari Iran.

Negosiasi ini seperti ladang ranjau kesalahpahaman, adapun pihak yang tulus untuk mencari solusi tetapi sebenarnya mereka mencari solusi untuk masalah yang salah. Sehingga kesepakatan apapun hanya akan menghasilkan ketidakpercayaan lebih lanjut antara AS dan Iran.

AS dengan cepat mendelegasikan masalah ini kepada Eropa, yang kadang-kadang masuk untuk mengacaukan negosiasi terbukti sebagai penyetir yang hebat. AS mengindikasikan kepada Eropa bahwa mereka tidak akan senang kecuali Iran menghentikan program nuklirnya, yang jelas-jelas melanggar hukum NPT tersebut dan sekaligus menjungkirbalikkan gagasan yurisendensi Barat.

Protokol Tambahan merupakan upaya untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh pada instalasi nuklir Iran. Meski legal namun Ini merupakan upaya yang kerdil dari Eropa, dimana mereka menaruh elemen kewajiban di dalam sebuah

perjanjian yang awalnya bersifat sukarela.

Ketidakjelasan ini merupakan indikasi dari berbagai kesulitan yang akan muncul di kemudian hari, khususnya setelah ketidakpercayaan Republik Islam Iran terhadap legalisme Barat yang telah lama terbangun. Menariknya mereka menghindari pemakaian istilah “penghentian permanen” dengan mengatakan “penghentian sementara” yang berjangka panjang.

Kedua belah pihak sama-sama pesimistis akan kesepakatan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketakutan psikologis para negosiator Iran, dimana mereka khawatir bahwa kompromi isu nuklir hanya akan membuat Amerika Serikat beralih ke Iran dengan kekuatan militer.

AS khususnya setelah serangan 11 September, tendensinya jelas, adalah melakukan konfrontasi dengan siapapun yang menentangnya. Kesepakatan dengan Eropa adalah sebuah hal yang menakutkan bagi Iran, karena Amerika Serikat secara fisik tidak terlibat dalam negosiasi tersebut. Akibatnya negosiasi ini terlihat seperti menambal-sulam masalah dan rentan akan sabotase di segala sisi.

Negosiasi nuklir tahun 2004 dimulai dengan atmosfer yang menakutkan bagi rakyat Iran, transformasi perubahan politik dalam negeri Iran akan merubah arah negosiasi dalam arena politik nuklir, dimulai ketika Parlemen baru memandang remeh prospek kesepakatan kompromi. Hal ini karena Eropa dan Amerika Serikat saling berdebat, alih-alih melakukan kesepakatan dengan Eropa, Iran merasa harus waspada dengan tikaman AS dari belakang.

Kepercayaan sudah memudar, dan pada akhir masa kepresiden Khatami pada Maret 2005 kesepakatan nuklir akan berubah secara drastis seiring perubahan rezim di Republik Islam Iran. Merasa yakin bahwa Barat tidak akan memprotes dan sadar akan kekuatan baru Iran, parlemen baru ini tidak berniat meratifikasi Protokol Tambahan.

Naiknya kelompok neokonservatif di Iran serta kedatangan Ahmadinejad memperlihatkan perubahan dalam dinamika politik dalam negeri Iran. Sanksi-sanksi yang tadinya dipakai untuk menakut-nakuti pemerintahan sebelumnya, termasuk dibawa ke Dewan Keamanan PBB, rupanya disambut dingin oleh tim baru tersebut.

Para negosiator gagal dalam membaca masalah yang ditimbulkan dinamika politik kultural ini. Negosiasi nuklir ini hanya memperlihatkan detail-detail kecil masalah tersebut, dan mengabaikan konteks politik dan inti permasalahannya. Terlebih kini negosinya adalah permasalahan trilateral, dimana masing-masing pihak berusaha menenangkan banyak pihak. Faktanya kebuntuan nuklir hanya akan memicu konfrontasi lebih lanjut antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran.

## KESIMPULAN

Konsekuensinya kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat lebih bersifat konfrontatif daripada konstruktif, menghukum daripada sebuah cara menuju sasaran. Dimana ketiadaan bukti dalam pengembangan senjata nuklir oleh Iran dianggap sebagai bukti kesalahan.

Amerika Serikat justru menerapkan sanksi, embargo, membawa Iran ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat juga mengeluarkan opsi militer terkait masalah nuklir Republik Islam Iran 2003-2008.

Konfrontasi Amerika Serikat dan Republik Iran semakin meningkat akibat isu nuklir ini, dan konfrontasi ini dapat berubah menjadi konflik. Iran dan Amerika Serikat pada hari ini telah menjadi tetangga di beberapa perbatasan, dan yang terpenting adalah struktur budaya hubungan kedua negara memang mendorong untuk konflik. Konflik yang mungkin diterima banyak orang, namun hanya sedikit yang memahaminya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AB65/611 Iran: *Introduction of Nuclear Power, correspondence, 1969-1985.*
- Ansari M. Ali. 2006. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.
- Archiv Editions, 1977 : 601-602. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan.* Yogyakarta: Bentang.
- Alexander. Y dan Nanes.A. 1980. *The United States and Iran: A Documentary History.* Maryland: University Publications of America. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran.* Jakarta: Zahra.
- Bruck, Connie. 2006. *How Iran's Expatriates Are Gaming the Nuclear Threat.* The New Yorker, Exiles. Dalam Ali M.

- Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra.
- Glock, Charles Y. 1972. *Images of God, Images Of Man, and the Organization of Social Life. Journal for Scientific Study of Religions*. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor
- Hajizadeh, M. 2002. *Aqazadeh-ha, Jameh Daran, Teheran, 1381*. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra
- Held, David. 2000, *Regulation Globalization, international sociology*. Dalam David C. Leege dan Lyman A. Kellstedt, 2006, *Agama Dalam Politik Amerika*. Jakarta. Freedom Institute dan Yayasan Obor.
- Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI.
- Melhuis, to Wright 21 Juni 1972. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra
- Memoir Dr. Etemad, di akses [www.iranian.com/books/march98/Nuclear/Images/p1.gif](http://www.iranian.com/books/march98/Nuclear/Images/p1.gif).
- Nuri, A. 1998. *Shokoran-e Elsayh (Hemlock of Reform, Tehran. Tar-e No*. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra
- Roosevelt, Kermit. 1979. *Countercoup: the Struggle for the Control of Iran*. New York. MacGraw Hill.
- Reuters, 17 Januari 2005. Dalam William Blum. 2013. *Ekspor Amerika Paling Mematikan*. Yogyakarta: Bentang.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. RINEKA CIPTA.
- Sutopo. H.B. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Suryabrata, Sumadi. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta. PT.Rajagrafindo Persada.
- Times Iran, 1991 : 1-12. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra
- Tocqville, Alexis D. [1835, 1840], 1958. *Democracy in America*. Terj. Phillips Bradley. New York: Vintages Books.
- Wald, Kenneth D. 1992. *Religion and Politics in the United States*. Washington DC. Congressional Quarterly Press. FO 317 157604 EP 1015/102 Internal Political Situation, 18 Mei 1961
- IRNA, 2 Juni 2003, BBC SWB Mon ME1 MEPol. Dalam Ali M. Ansari. *Supermasi Iran*. Jakarta: Zahra  
<http://www.un.org/News/Press/docs/2006/sc8792.doc.htm>.  
[http://www.nti.org/e/e\\_research/profile/Iran.htm](http://www.nti.org/e/e_research/profile/Iran.htm)  
<http://www.basicint.org/pubs/Notes/BN060609.htm>